

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGADAAN BUS SEKOLAH GRATIS BAGI PELAJAR DI KECAMATAN MANDAU KABUPATEN BENGKALIS

OLEH

Mentari/ 1301113884

(mentari1510@yahoo.co.id)

Pembimbing : Zulkarnaini, S.Sos, M.Si

Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Program Studi Ilmu Administrasi Publik FISIP Universitas Riau

Kampus Bina Widya Jl. HR Soebrantas Km. 12,5 Simpang Baru Pekanbaru 28293

Telp/Fax 0761-63272

Abstract

These day Transportation technology experienced development as well the increasing human needs for transportation but it's not followed with increasing the amount of transportation facility which is public transportation, one of the kind is in Sub-district Mandau District Bengkalis where in the end causes so many underage students brave enough to ride motorized vehicle to school caused by there is no public transportation onto their school and this problem causes students become contributor for traffic incident and violation number annually causes UPTD Perhubungan Sub-district Mandau-Pinggir in the end provides procurement free school bus to eases the student go to their school and decrease the usage amount of motorized vehicle of underage student, based on that the researcher is interested to evaluate how the implementation of free school bus procurement policy for students in Sub-district Mandau District Bengkalis. Theoretical concept used is implementation based from George C. Edward III, which is said that in public policy implementation contains 4 variables; communication, resources, disposition/behavior of the executor and bureaucracy structure. The purpose of this research is to analyze how the implementing and what factors that affect the implementation of free school bus procurement policy for students in Sub-district Mandau District Bengkalis. This research uses qualitative method with illustrate and explain the existence problem with answers and problems based of facts that existed. In collecting data, researcher use methods of interview, observation, and documentation with snowball sampling method as the source of information and data analyzing with descriptive qualitative method. The research result showed that the execution of the implementation of free school bus procurement policy for students in Sub-district Mandau District Bengkalis has been completed although it has not been effective yet, this is caused by the limit of facilities and infrastructures where the amount of bus fleets not yet adequate, funds limited, and community customs in dicipline.

Keyword: Implementation, Procurement Policy, School Bus

1.1 Latar Belakang

Transportasi merupakan salah satu aspek penting dalam kehidupan manusia karena transportasi memiliki kontribusi yang besar pada kehidupan manusia dalam kaitannya dengan segala aktifitas manusia sehari-hari. Di era modern ini, aktifitas yang dilakukan oleh manusia lebih banyak dan beragam jenisnya untuk itulah keberadaan transportasi menjadi sangat penting untuk menunjang kebutuhan perpindahan dari suatu tempat ke tempat lainnya.

Dewasa ini perkembangan akan teknologi transportasi juga berdampak bagi kemajuan alat transportasi yang digunakan oleh masyarakat. Mulai dari kendaraan roda 2 (dua), roda 4 (empat) hingga kendaraan alat berat lainnya baik itu milik pribadi maupun milik industri pelayanan jasa. Banyaknya jenis kendaraan umum yang saat ini dirasa cukup membantu untuk mempermudah masyarakat mencapai tempat tujuan mereka sehari-hari. Namun pesatnya perkembangan teknologi transportasi tidak diiringi dengan kemajuan di bidang pelayanannya. Mulai dari ketersediaan sarana angkutan umum yang kurang memadai, ketidakpastian waktu operasi angkutan umum, keselamatan, keamanan, serta kenyamanan yang sangat minim menjadi permasalahan yang dapat mengakibatkan menurunnya tingkat produktifitas para pelajar karena pelajar merupakan salah satu pengguna jasa transportasi umum. Dalam kasus lain, seringkali para operator angkutan umum enggan untuk mengangkut para pelajar pada jam-jam sibuk pagi karena tarif yang ditentukan oleh pemerintah bagi para pelajar dianggap sangat murah dan merugikan operator angkutan umum.

Dengan adanya perkembangan teknologi transportasi saat ini, jumlah sarana transportasi yang digunakan yang menunjukkan peningkatan yang cukup

signifikan adalah pengguna kendaraan bermotor. Pengguna kendaraan bermotor tersebut beragam mulai pelajar hingga orang tua.

Meningkatnya jumlah pengguna kendaraan bermotor juga diiringi dengan meningkatnya angka kecelakaan dan pelanggaran lalu lintas setiap tahunnya hingga muncul istilah jalan raya sebagai pembunuh nomor satu di Indonesia. Meskipun aturan untuk membatasi pengguna jalan telah banyak diterbitkan sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, namun pada kenyataannya pelanggaran masih saja tetap terjadi tak terkecuali di Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis yang menjadi salah satu jalur lintas Sumatera dimana mobil dan truk besar sering melintas di daerah ini. Kecelakaan maupun pelanggaran lalu lintas cenderung didominasi oleh kendaraan roda dua dimana para pelaku ataupun yang menjadi korban salah satunya adalah anak di bawah umur.

Salah satu alasan terbesar penggunaan kendaraan bermotor oleh pelajar di bawah umur adalah karena kesulitan untuk mendapatkan akses untuk menuju ke sekolah karena kurangnya sarana transportasi umum dan kecelakaan umumnya terjadi di luar jam masuk dan pulang sekolah. Selain itu berbagai macam permasalahan yang ada pada angkutan umum seperti yang telah dijelaskan di atas menjadi penyebab lain maraknya penggunaan kendaraan bermotor oleh pelajar di bawah umur.

Jika alasan penggunaan kendaraan bermotor oleh pelajar di bawah umur ke sekolah adalah karena kesulitan mendapatkan akses menuju ke sekolah, hal ini bisa diatasi dengan menyediakan angkutan sekolah atau bus sekolah yang memadai terutama secara gratis tanpa memungut biaya kepada para pelajar seperti

halnya dalam ketetapan Dirjen Perhubungan Darat dalam Pedoman Teknis Penyelenggaraan Angkutan Sekolah Dirjen Perhubungan Darat tentang penyesuaian tarif yang diberikan sepenuhnya kepada kebijakan dari Pemerintah Daerah berlandaskan pada kepentingan operasionalnya dan membuat kebijakan menyeluruh yang melarang para pelajar di bawah umur untuk berkendara di jalan raya sehingga angka kecelakaan dan pelanggaran lalu lintas bisa diminimalisir.

Layanan transportasi sekolah merupakan kegiatan pemberian fasilitas untuk melayani antar jemput peserta didik dengan tujuan memudahkan transportasi dari dan menuju sekolah. Peserta didik akan dapat datang atau pulang sekolah dengan tepat waktu, sehingga disiplin waktu peserta didik akan meningkat. Layanan transportasi ini dapat diwujudkan dengan mengadakan atau menyediakan bus sekolah.

Bus sekolah merupakan kendaraan berdaya tampung banyak yang digunakan untuk mengangkut para pelajar ke sekolah. Bus sekolah tentunya menjadi salah satu bagian dari sistem transportasi publik di berbagai Negara termasuk di Indonesia yang dikelola dan disubsidi penuh oleh pemerintah. Di samping itu, dengan meningkatnya biaya pendidikan pada masa sekarang ini, layanan bus sekolah gratis dapat dijadikan sebagai salah satu bagian dari fasilitas pendidikan yang memberikan alternatif solusi untuk mengatasi peningkatan biaya pendidikan. Selain itu bus sekolah tentu saja memiliki banyak manfaat lainnya yaitu :

1. Mengurangi penggunaan sepeda motor oleh para pelajar yang memang belum cukup umur untuk menggunaan sepeda motor.
2. Mengurangi kemacetan
3. Mengurangi polusi
4. Hemat biaya

5. Orang tua tidak perlu repot mengantar jemput anak sekolah.
6. Anak dapat bersosialisasi dengan murid sekolah lain di dalam bus sekolah.
7. Angka kecelakaan pada remaja/pelajar dapat diminimalisir.
8. Menjadikan anak lebih mandiri dan sehat (ada unsur jalan kaki untuk menuju ke halte bus sekolah)

Salah satu daerah yang mengadakan penyediaan bus sekolah gratis bagi pelajarnya adalah Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis, dimana pengadaan ini dilakukan oleh UPT Dinas Perhubungan Kecamatan Mandau-Pinggir Kabupaten Bengkalis yang disetujui untuk direalisasikan oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika (Dishubkominfo) Kabupaten Bengkalis melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bengkalis tahun 2015 namun baik itu biaya operasional, gaji supir maupun bahan bakar dianggarkan ke APBD Kabupaten Bengkalis tahun 2016. Pengadaan bus sekolah gratis bagi pelajar ini dilakukan secara bertahap dan sesuai dengan urgensinya dan dengan berdasarkan kepada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Adapun rincian anggaran yang diberikan untuk pengadaan bus ini yaitu 1,2 Milyar untuk 2 Unit serta biaya pemeliharaan ringan ringan sebesar 7,5 Juta per unit untuk satu tahunnya serta untuk operasional supir dan kernet di anggarkan sebesar 2,4 Juta perbulan untuk perorangan.

Pengadaan bus sekolah gratis ini bertujuan untuk mengurangi kebiasaan pelajar di bawah umur untuk berkendara sehingga bisa menekan angka pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas, selain itu juga bertujuan untuk mempermudah para pelajar mulai dari tingkat Sekolah Dasar (SD) hingga Sekolah Menengah Atas (SMA) di Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis

menuju sekolah mereka masing-masing terutama mereka yang sekolahnya tidak dilalui oleh angkutan umum tanpa dipungut biaya sedikitpun.

Pelaksanaan pengadaan bus sekolah gratis bagi pelajar ini sudah dimulai sejak awal Februari 2016 dimana pengawasan dilakukan langsung oleh pihak UPT Dinas Perhubungan Kecamatan Mandau-Pinggir Kabupaten Bengkalis. Pada tahap perencanaannya akan disediakan enam unit armada bus untuk memenuhi kebutuhan di Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis namun ketika kebijakan pengadaan bus sekolah gratis bagi pelajar ini dijalankan baru dua unit armada bus yang terealisasi. Hal ini ditandai dengan dibeli dan dioperasikannya dua unit bus New Coaster berwarna kuning buatan pabrik Mitsubishi type FE 84G BC. Masing-masing dari unit bus sekolah gratis tersebut setiap harinya dikendarai oleh seorang supir yang dibantu oleh seorang kernet.

Setiap harinya dua unit bus sekolah gratis ini akan beroperasi sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan oleh pihak UPT Dinas Perhubungan Kecamatan Mandau-Pinggir Kabupaten Bengkalis. Selain memiliki jadwal keberangkatan dan kepulangan, setiap harinya dua unit bus sekolah ini juga memiliki titik kumpul agar para pelajar bisa menggunakan fasilitas ini yaitu di 14 halte yang telah didirikan. Ke-14 halte tersebut tersebar di sepanjang beberapa ruas jalan di Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis yang tidak dilalui oleh angkutan umum.

Adapun jalan-jalan yang dilintasi atau dilalui oleh bus sekolah gratis ini setiap harinya yaitu di mulai dari Simpang Asrama Tribata, Simpang Kayangan KM. 04 hingga KM. 09, Jalan Lintas Barat, Jalan Rantau dimana Desa Petani berada, Simpang Jurong, Jalan Blading, dan Jalan Siak yang berada di Jalan Lintas Duri-Dumai. Apabila

bus sekolah gratis ini tidak dioperasikan maka bus sekolah gratis ini harus diparkirkan di Terminal Angkutan Kota (angkot) Duri Bestari yang terletak di Jalan Pertanian Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis.

Beberapa sekolah yang setiap harinya dilalui atau yang berada di rute perjalanan bus sekolah gratis ini yaitu SDN 033 mandau, SDN 083 Mandau, SMPN 05 Mandau, SMPN 09 Mandau dan SMAN 07 Mandau.

Setiap harinya dalam satu keberangkatan bus sekolah gratis ini hanya diperbolehkan untuk dinaiki oleh pelajar dengan jumlah maksimal 36 orang, dimana 26 orang bisa menduduki tempat duduk yang tersedia di dalam bus sekolah gratis ini sedangkan 10 orang lainnya harus berdiri selama perjalanan. Para pelajar yang ingin menaiki bus sekolah ini harus dalam keadaan menggunakan seragam sekolah mereka dan mereka harus naik ataupun turun di halte yang telah disediakan. Namun apabila para pelajar terlambat atau tidak berada di halte pada waktu keberangkatan ataupun kepulangan bus sekolah gratis yang telah ditetapkan maka mereka akan ditinggal.

Dalam praktek kehidupan sehari-hari, pada umumnya peraturan-peraturan yang telah ditetapkan dan diberlakukan sering kali masih dilanggar, pelanggaran ini salah satunya disebabkan oleh kurangnya kesadaran dan adanya kebiasaan hidup yang tidak baik.

Seiring dengan meningkatnya penggunaan kendaraan bermotor oleh pelajar di bawah umur yang disebabkan oleh sulitnya mendapatkan akses untuk menuju sekolah dikarenakan kurangnya sarana transportasi umum maka pengadaan bus sekolah gratis dirasa tepat untuk memberi kemudahan para pelajar di Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis untuk menuju

ke sekolah mereka masing-masing terutama mereka yang sekolahnya tidak dilalui oleh angkutan umum serta mampu mengurangi penggunaan kendaraan bermotor oleh pelajar di bawah umur. Namun implementasi kebijakan pengadaan bus sekolah gratis bagi pelajar di Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis oleh UPTD Perhubungan Kecamatan Mandau-Pinggir Kabupaten Bengkalis masih belum efektif karena masih banyaknya kekurangan dan pelanggaran yang ditemukan pada saat pengimplementasian kebijakan pengadaan bus sekolah gratis ini.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis dapat merumuskan permasalahan pokok Sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi kebijakan pengadaan bus sekolah gratis bagi pelajar di Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis.
2. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan pengadaan bus sekolah gratis bagi pelajar di Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis.

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui implementasi kebijakan pengadaan bus sekolah gratis bagi pelajar di Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan pengadaan bus sekolah gratis bagi pelajar di Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis.

2. Manfaat Penelitian

a. Secara Teoritis

Untuk pengembangan ilmu pengetahuan yang di dapat selama perkuliahan dan untuk mengembangkan pemahaman disertai dengan pemecahan masalah serta melatih penulis dalam menerapkan teori-teori dan pengalaman yang di dapat selama perkuliahan.

b. Secara praktis

1. Sebagai sumbangan pemikiran dan bahan masukan bagi pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Meranti.
2. Sebagai bahan informasi atau gambaran yang lebih rill, khususnya mengenai implementasi kebijakan pengadaan bus sekolah gratis bagi pelajar di Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis.

1.4 Konsep Teori

1. Teori Kebijakan Publik

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kebijakan diartikan sebagai rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak (tentang pemerintahan, organisasi, dsb); pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip dan garis pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran.

Carl J. Federick sebagaimana dikutip **Agustino (2008;7)** mendefinisikan kebijakan sebagai serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijakan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Pendapat ini juga menunjukkan bahwa ide kebijakan melibatkan perilaku yang memiliki maksud dan tujuan merupakan bagian yang penting

dari definisi kebijakan, karena bagaimanapun kebijakan harus menunjukkan apa yang sesungguhnya dikerjakan daripada apa yang diusulkan dalam beberapa kegiatan pada suatu masalah.

Wahab (2008:40) mengemukakan bahwa istilah kebijakan sendiri masih terjadi silang pendapat dan menjadi ajang perdebatan bagi para ahli. Maka untuk memahami istilah kebijakan, **Wahab (2008:40-50)** memberikan beberapa pedoman sebagai berikut:

- a) Kebijakan harus dibedakan dari keputusan
- b) Kebijakan sebenarnya tidak serta merta dapat dibedakan dari administrasi
- c) Kebijakan mencakup perilaku dan harapan-harapan
- d) Kebijakan mencakup ketiadaan tindakan ataupun adanya tindakan
- e) Kebijakan biasanya mempunyai hasil akhir yang akan dicapai
- f) Setiap kebijakan memiliki tujuan dan sasaran tertentu
- g) Kebijakan muncul dari suatu proses yang berlangsung sepanjang waktu
- h) Kebijakan meliputi hubungan-hubungan yang bersifat antar organisasi dan yang bersifat intra organisasi
- i) Kebijakan publik meski tidak eksklusif menyangkut peran kunci lembaga-lembaga pemerintah
- j) Kebijakan itu dirumuskan atau didefinisikan secara subyektif.

Chander dan Plano dalam Pasolong (2008:38) kebijakan publik adalah pemanfaatan strategi terhadap sumber-sumber daya yang ada untuk memecahkan masalah publik atau pemerintah. **Nasucha dalam Pasolong (2008:39)** mengatakan bahwa kebijakan publik adalah kewenangan

pemerintah dalam pembuatan suatu kebijakan yang digunakan ke dalam perangkat peraturan hukum. Kebijakan tersebut bertujuan untuk menyerap dinamika sosial dalam masyarakat, yang akan dijadikan acuan perumusan kebijakan agar tercipta hubungan sosial yang harmonis.

2. Teori Implementasi Kebijakan

Konsep implementasi berasal dari bahasa Inggris yaitu *to implement*. Dalam kamus besar Webster, *to implement* (mengimplementasikan) berarti *to provide the means for carrying out* (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu); dan *to give practical effect to* (untuk menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu) **Webster dalam Wahab (2008:59)**.

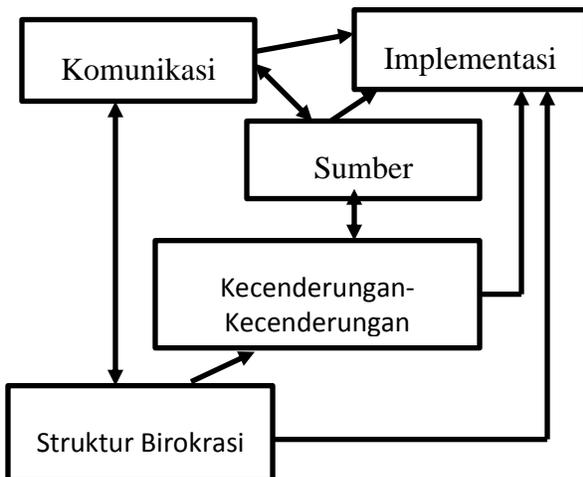
Menurut **Safi'I dalam As'ari (2007:47)** kebijakan publik adalah rangkaian pilihan-pilihan yang saling berhubungan yang dibuat oleh lembaga atau pejabat pemerintah pada bidang-bidang yang menyangkut tugas pemerintah dan menurut **Van Meter dan Van Horn dalam Sujianto (2008:29)** implementasi yang berhasil seringkali membutuhkan mekanisme-mekanisme dan prosedur-prosedur lembaga. Hal ini sebenarnya akan mendorong kemungkinan besar bagi pejabat atas untuk mendorong pejabat bawah untuk bertindak dengan cara yang konsisten dengan ukuran-ukuran dasar tujuan-tujuan kebijakan.

Pengertian implementasi oleh **Van Meter dan Van Horn dalam Wahab (2008:29)** bahwa implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu, pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan keputusan kebijakan. Implementasi kebijakan juga diartikan oleh **Agustino (2008:19)** sebagai suatu proses yang dinamis, dimana pelaksana kebijakan melakukan suatu aktivitas atau kegiatan, sehingga pada akhirnya akan mendapatkan

suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri.

Teori implementasi menurut **Edward III** dalam **Widodo (2011;96-110)** menjelaskan bahwa terdapat empat variabel kritis dalam implementasi kebijakan publik yaitu:

- 1) Komunikasi
Tipe komunikasi yang diajukan oleh **George C. Edwards III** dalam **Agustino (2008;157-158)** mengemukakan tiga variabel, yaitu:
 - a. Transmisi
 - b. Kejelasan
 - c. Konsistensi
- 2) Sumber daya : ini berkaitan dengan sumber daya pendukung dalam pelaksanaan kebijakan, yaitu:
 - a. Sumber daya manusia
 - b. Informasi
 - c. Kewenangan
 - d. Sarana dan prasarana
 - e. Pendanaan
- 3) Sikap dan komitmen dari pelaksana.
- 4) Struktur birokrasi
Menurut **Edwards III** dalam **Winarno (2016;177-182)** terdapat dua karakteristik utama dari birokrasi, yaitu:
 - a. SOP (*Standart Operational Procedure*)
 - b. Fragmentasi



Sumber : Winarno, 2016

Gambar 1.1

Model Edwards III

1.5 METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Metode penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Metode deskriptif merupakan metode penelitian dalam suatu kelompok manusia sebagai suatu obyek dalam suatu kondisi dari sebuah sistem pemikiran. Tujuan penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat gambaran atau lukisan secara sistematis, factual dan akurat mengenai fakta-fakta serta sifat-sifat fenomena yang diteliti.

2. Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh data primer maka penelitian ini dilakukan di UPT Dinas Perhubungan Kecamatan Mandau-Pinggir Kabupaten Bengkalis, yang terletak di Jalan Lintas Duri - Dumai KM 14 Kulim. Hal ini dikarenakan instansi tersebut merupakan pelaksana Kebijakan Pengadaan Bus Sekolah Gratis Bagi Pelajar di Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis.

3. Informan penelitian

Informan adalah seorang atau sekelompok orang yang menjadi sumber data dalam penelitian atau orang yang memberikan keterangan kepada peneliti. Informan merupakan suatu istilah yang memberikan pengertian kepada subjek yang bertugas memberikan data yang akurat dalam bentuk informasi kepada peneliti.

Dalam penelitian ini adapun yang menjadi informan adalah Kepala Dinas Perhubungan, Sekretariat Dinas Perhubungan, Kepala UPTD Perhubungan, Kepala Bagian Pelaksana Urusan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Supir Bus, Pelajar serta Orangtua Pelajar/Wali Murid.

Selanjutnya informan penelitian ditentukan dengan menggunakan metode

Snowball sampling adalah teknik penentuan sampel yang mula-mula jumlahnya kecil kemudian membesar. Ibarat bola salju yang menggelinding yang lama-lama menjadi besar. Dalam penentuan sampel, pertamanya dipilih satu atau dua orang, tetapi karena dengan dua orang ini belum merasa lengkap terhadap data yang diberikan, maka peneliti mencari orang lain yang dipandang lebih tahu dan dapat melengkapi data yang diberikan oleh dua orang sebelumnya. Begitu seterusnya, sehingga jumlah sampel semakin banyak. **Sugiyono (2013 :39)**

4. Sumber Data

Jenis dan sumber data dalam penelitian ini adalah:

1. Data Primer. Yaitu data dalam penelitian yang diperoleh langsung dari informan berupa informasi utama yang diperoleh melalui wawancara langsung guna memperoleh jawaban yang relevan terhadap permasalahan, observasi langsung di lapangan dan dokumentasi terkait implementasi kebijakan pengadaan bus sekolah gratis bagi pelajar di Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis.
2. Data Sekunder. Yaitu data pendukung penelitian yang diperoleh dari UPT Dinas Perhubungan Kecamatan Mandau-Pinggir Kabupaten Bengkalis, seperti jumlah armada bus, spesifikasi bus, rute yang dilalui, dan lain-lain yang dinilai berkaitan dengan penelitian ini.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Yaitu mengadakan tanya jawab secara langsung dengan informan yang dijadikan objek penelitian agar memperoleh data yang sesuai dengan permasalahan yang diteliti.

b. Observasi

Yaitu dimana peneliti melakukan pengamatan secara langsung terhadap objek yang diteliti mengenai Implementasi

Kebijakan Pengadaan Bus Sekolah Gratis Bagi Pelajar di Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis. Proses ini berlangsung dengan pengamatan yang meliputi melihat, merekam dan mencatat kejadian. Observasi dapat dikatakan sebagai kegiatan yang menjadi pencatatan secara sistematis kejadian, perilaku objek yang diteliti dan hal-hal yang diperlukan untuk mendukung penelitian.

c. Studi Literatur

Merupakan teknik pengumpulan data dan informasi melalui buku-buku dan referensi-referensi dari hal-hal yang berkaitan dengan penelitian ini.

6. Analisis Data

Analisis data merupakan proses penyerderhanaan data kedalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. Analisis data yang digunakan adalah analisis yang bersifat penalaran mengenai fenomena-fenomena yang akan diteliti, setelah data dikumpulkan melalui teknik observasi dan wawancara kemudian penulis menganalisis data secara deskriptif kualitatif.

Bogdan dan Taylor dalam **Moleong (2007:4)** mendefinisikan metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Untuk meningkatkan tingkat kepercayaan dan devaliditas terhadap penelitian ini, peneliti melakukan teknik triangulasi. Teknik triangulasi adalah pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini akan memaparkan hasil penelitian yang peneliti lakukan selama di lapangan dengan judul Implementasi Kebijakan Pengadaan Bus Sekolah Gratis Bagi Pelajar di Kecamatan Mandau

Kabupaten Bengkalis. Dan peneliti melakukan analisis fenomena di lapangan dengan menggunakan teori Edwards III.

A. KOMUNIKASI

Komunikasi berkaitan dengan bagaimana sebuah kebijakan dikomunikasikan pada organisasi atau publik, ketersediaan sumber daya untuk melaksanakan kebijakan, sikap dan tanggung dari para pelaku yang terlibat dalam mengimplementasikan suatu kebijakan dan bagaimana struktur organisasi pelaksana kebijakan (Widodo, 2011). Widodo kemudian menambahkan bahwa informasi perlu disampaikan kepada pelaku kebijakan agar pelaku kebijakan dapat memahami apa yang menjadi isi, tujuan, arah, kelompok sasaran (target group) kebijakan, sehingga pelaku kebijakan dapat mempersiapkan hal-hal apa saja yang berhubungan dengan pelaksanaan kebijakan, agar proses implementasi kebijakan bisa berjalan dengan efektif serta sesuai dengan tujuan kebijakan itu sendiri. Komunikasi dalam kerangka penyampaian informasi kepada para pelaksana kebijakan tentang apa yang menjadi standart dan tujuan harus konsisten dan seragam.

Dalam pengimplementasian sebuah kebijakan komunikasi mencakup beberapa dimensi penting yaitu transmisi informasi yaitu penyaluran komunikasi yang baik akan menghasilkan suatu implementasi yang baik dimana dimensi ini menghendaki agar informasi tidak hanya disampaikan kepada pelaksana kebijakan tetapi juga kepada kelompok sasaran dan pihak terkait. Kemudian dimensi kejelasan dimana komunikasi dalam memberikan segala informasi terhadap pelaksana kebijakan harus jelas dan tidak membingungkan serta mudah dipahami, selain itu untuk menghindari terjadinya kesalahan-kesalahan interpretasi dari pelaksana kebijakan. Sedangkan dimensi konsisten menghendaki agar informasi ataupun perintah yang

disampaikan harus konsisten dan jelas untuk ditetapkan dan dijalankan sehingga tidak menimbulkan kebingungan bagi pelaksana kebijakan baik oleh individu, kelompok sasaran maupun pihak yang terkait dalam implementasi kebijakan.

Salah satu cara agar komunikasi berjalan sesuai dengan yang diharapkan yaitu dengan melakukan pembinaan. Pembinaan berarti membangun, menggambarkan dan memperbaiki suatu keadaan agar lebih teratur dan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada. Yang dilakukan secara bertahap agar lebih berkembang ke arah yang sesuai dengan yang di harapkan. Membina berarti memperbaiki atau mengarahkan dengan cara halus dan tidak ada kekerasan.

Kelancaran dalam berkomunikasi sangat penting dan menyangkut implementasi pengadaan bus sekolah gratis bagi pelajar di Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis ini komunikasi terjadi di antara pihak Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis, UPTD Perhubungan Kecamatan Mandau-Pinggir dan UPTD Pendidikan Kecamatan Mandau, dimana gambaran komunikasi antara pihak terkait berjalan dengan baik seperti yang dijelaskan informan saat peneliti melakukan wawancara di lapangan, dan berikut penjelasan yang diberikan oleh informan terkait komunikasi:

“Komunikasi berjalan sangat baik dan ini terbukti dengan terlaksananya program Bus Sekolah Gratis untuk para pelajar di Kecamatan Mandau, ketika adanya keluhan dari pihak sekolah ke pihak UPTD Pendidikan kemudian disampaikan adanya kebutuhan bus sekolah kepada pihak UPTD Perhubungan hingga akhirnya pihak UPTD Perhubungan berinisiatif untuk melaksanakan program pengadaan bus gratis untuk pelajar dan setelah diajukan ke pihak Dishub Kabupaten Bengkalis dan

disetujui sampai akhirnya sekarang telah terlaksana dan ini jadi bukti bahwa komunikasi berjalan sangat baik tidak hanya antara pihak UPTD Perhubungan dengan Dishub namun juga antara pihak UPTD Pendidikan dan UPTD Perhubungan begitupun komunikasi dengan pihak sekolah". (Wawancara dengan Fakhairul Yazid, Kepala UPTD Perhubungan Kecamatan Mandau-Pinggir, 03 April 2017).

B. SUMBER DAYA

Sumber daya adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan sumber daya pendukung dalam pelaksanaan suatu kebijakan. Sumber daya merupakan salah satu faktor penting dalam mengimplementasikan sebuah kebijakan maupun program, karena bagaimanapun baiknya suatu kebijakan atau program itu dirumuskan (telah memenuhi kejelasan perintah dan konsistensi dalam menyampaikan perintah dan arahan informasi) tanpa adanya dukungan sumber daya yang memadai, maka kebijakan ataupun program akan mengalami kesulitan dalam proses pengimplementasiannya dan bisa saja kebijakan maupun program yang telah dirumuskan tidak akan berjalan dengan baik. Meskipun komunikasi oleh pelaksana kebijakan berjalan dengan baik, jika terdapat kekurangan atau permasalahan terhadap sumber-sumber yang mendukung pengimplementasian sebuah kebijakan maka implementasi kebijakan tersebut cenderung tidak efektif.

Jika dirincikan sumber daya terpenting menurut **Edwards III** dalam mengimplementasikan suatu kebijakan publik adalah :

a. Sumber Daya Manusia (SDM) / Staff

Sumber daya manusia (SDM) yang menjadi aktor utama dalam menunjang

pelaksanaan kebijakan yang memiliki potensi di bidangnya dengan memiliki latar pendidikan, pengalaman, keahlian maupun hubungan personal.

"Untuk masalah staf yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan ini jumlahnya sudah memadai sesuai dengan yang dibutuhkan. Baik itu yang beraktifitas di kantor UPTD Perhubungan ini maupun yang bertugas di lapangan. Untuk yang di kantor itu ada di bagian pelaksana urusan lalu lintas dan angkutan jalan dan di lapangan itu adalah satu orang supir beserta satu orang kernetnya di masing-masing bus dan keseluruhan staf tersebut diterima untuk bekerja oleh saya selaku kepala UPTD Perhubungan Kecamatan Mandau-Pinggir". (Wawancara dengan Fakhairul Yazid, Kepala UPTD Perhubungan Kecamatan Mandau-Pinggir, 03 April 2017).

b. Informasi

Informasi yang disampaikan maupun yang diterima harus jelas agar dapat mempermudah proses implementasian kebijakan tersebut. Informasi yang relevan dan cukup tentang bagaimana cara mengimplementasikan suatu kebijakan dan kerelaan atau kesanggupan dari berbagai pihak yang terlibat dalam implementasi kebijakan tersebut.

"Setelah inisiatif untuk memberikan fasilitas dalam bentuk bus sekolah gratis bagi pelajar ini disetujui oleh pihak Dishub Kabupaten Bengkalis dan pelaksanaannya dilimpahkan dan dipercayakan kepada kami, kami langsung melakukan perancangan dan penetapan terkait bus ini seperti jadwal dan rutenya untuk kemudian bisa disampaikan kepada pihak terkait dan juga tentunya kepada masyarakat baik itu melalui surat kabar, media online maupun dari mulut ke mulut dan apa yang kami maksudkan bisa terlaksana dan tersampaikan dengan baik". (Wawancara

dengan Fahkairul Yazid, Kepala UPTD Perhubungan Kecamatan Mandau-Pinggir, 03 April 2017).

c. Kewenangan

Merupakan hak yang dimiliki oleh aktor kebijakan yang terlibat baik untuk mengambil keputusan maupun memberikan perintah. Kewenangan juga diperlukan untuk menjamin dan meyakinkan bahwa kebijaksanaan yang akan dilaksanakan adalah sesuai dengan yang mereka kehendaki.

“Sejak pihak Dinas Perhubungan mengabdikan untuk merealisasikan pengadaan bus sekolah gratis ini maka pihak kami melimpahkan sepenuhnya kepada pihak UPTD Perhubungan Kecamatan Mandau-Pinggir mengenai bagaimana pelaksanaannya dan kami hanya melakukan pengawasan dan nantinya pihak UPTD Perhubungan memberikan laporan kepada kami agar kami juga bisa melakukan evaluasi”. (Wawancara dengan Radius Akima, S.Sos, MT., Sekretariat Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis, 16 Februari 2017).

d. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana yang menjadi alat pendukung dan pelaksana dari sebuah kebijakan dan biasanya disebut pula sebagai perlengkapan bagi para pelaksana kebijakan untuk melaksanakan tugas para aktor kebijakan.

“Yang menjadi sarana dan prasarana kebijakan ini tentu saja bus, halte, jalan yang dilewati serta orang-orang yang terlibat di dalamnya. Untuk saat ini baru dua unit bus yang sudah beroperasi sesuai dengan jadwal dan rute yang sudah kami tetapkan. Dalam waktu dekat memang akan dilakukan penambahan jumlah armada bus namun kami masih melakukan survey terhadap jalur yang akan dilaluinya karena kondisi jalan pun menjadi perhatian kami

karena apabila jalan tersebut sempit tentu saja bus akan mengalami kesulitan untuk melintas di jalan tersebut. Dan untuk yang bisa menikmati fasilitas ini tentu saja para pelajar yang harus dalam kondisi memakai seragam ketika menaiki bus ini serta mereka harus naik dan turun di halte-halte yang telah kami bangun dimana ada empat belas buah halte yang telah kami bangun di sepanjang rute yang dilalui bus ini. Jika mereka ingin menaiki bus ini mereka harus datang tepat waktu sesuai jadwal yang ada karena tidak ada kompensasi waktu bagi mereka yang terlambat.”. (Wawancara dengan Fauzan Isnaeni, SH, Kepala Bagian Pelaksana Urusan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan UPTD Perhubungan Kecamatan Mandau-Pinggir, 03 April 2017).

e. Pendanaan

Pendanaan berkaitan dengan pembiayaan operasional proses pengimplementasian suatu kebijakan, informasi yang relevan dan yang mencukupi mengenai bagaimana sebuah kebijakan diimplementasikan dan kerelaan serta kesanggupan dari pihak yang terlibat dalam pengimplementasian sebuah kebijakan.

“Pengadaan bus sekolah gratis ini dianggarkan ke dalam APBD Kabupaten Bengkalis Tahun 2015 namun untuk biaya operasional, gaji supir dan kernet, biaya bahan bakar serta biaya perawatan bus dan halte dianggarkan ke dalam APBD Kabupaten Bengkalis Tahun 2016. Untuk pengadaan dua unit bus tersebut kami menelan biaya 2,5 Milliar, untuk pemeliharaan bus kami menganggarkan 7,5 Juta untuk masing-masing unit setiap tahunnya dan 2,4 Juta per bulan untuk menggaji masing-masing supir dan kernet”. (Wawancara dengan Radius Akima, S.Sos, MT., Sekretariat Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis, 16 Februari 2017).

C. DISPOSISI

Disposisi atau sikap pelaksana yang dimaksud adalah kecenderungan-kecenderungan para pelaksana kebijakan dan masyarakat. Sikap pelaksana ini berkaitan dengan ketersediaan para implementor untuk menyelesaikan kebijakan publik tersebut.

Untuk melihat bagaimana sikap dari pelaksana terhadap kebijakan program bus sekolah gratis ini terutama mengenai pemahaman dan pengetahuan yang mereka miliki maka penulis melakukan wawancara dengan salah satu informan penelitian, berikut kutipan wawancara yang penulis lakukan :

“Kebijakan ini bertujuan untuk memudahkan akses para pelajar ke sekolah mereka masing-masing, melihat tingginya jumlah penggunaan kendaraan bermotor oleh pelajar di bawah umur dan tingginya jumlah kecelakaan dan pelanggaran lalu lintas yang melibatkan pelajar di bawah umur maka diharapkan dengan hadirnya program ini maka bisa menekan penggunaan kendaraan bermotor oleh pelajar di bawah umur dan angka kecelakaan dan pelanggaran lalu lintas tersebut dan untuk itu para petugas yang terlibat pun harus mengetahui fungsi dan tugasnya masing-masing agar bisa mencapai tujuan diadakannya bus sekolah gratis ini” (Wawancara dengan Fahkairul Yazid, Kepala UPTD Perhubungan Kecamatan Mandau-Pinggir, 03 April 2017).

Namun tentu saja apa yang dijalankan tidak selamanya berjalan lancar. Tentu saja ada kekurangan ataupun kesalahan diberbagai aspek, salah satunya adalah adanya keterlambatan kedatangan bus dari jadwal yang telah ditentukan. Tentu saja setiap tindakan ada konsekuensinya. Salah satu bentuk konsekuensi tersebut adalah dengan pemberian sanksi.

D. STRUKTUR BIROKRASI

Struktur merupakan upaya untuk menata atau memanagermen sebuah pekerjaan dengan baik agar tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai. Struktur birokrasi sangatlah berpengaruh dalam pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan. Dimana penilaian dari suatu organisasi sangat mempengaruhi dari keberhasilan suatu implementasi kebijakan. Untuk mengetahui bagaimana gambaran pengimplementasian kebijakannya dalam tujuan dan tugas pokok UPTD Perhubungan Kecamatan Mandau-Pinggir berikut hasil wawancara peneliti dengan informan penelitian :

“Sejauh ini untuk implementasi kebijakan belum ada masalah dan terhadap sumber dayanya juga tidak ada masalah dan berjalan dengan baik cuma mungkin ketika nanti ada penambahan bus harus lebih dimaksimalkan lagi pengelolaannya”. (Wawancara dengan Fahkairul Yazid, Kepala UPTD Perhubungan Kecamatan Mandau-Pinggir, 03 April 2017).

E. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi berdasarkan penemuan yang peneliti lakukan selama di lapangan, yang berkaitan dengan implementasi kebijakan pengadaan bus sekolah gratis bagi pelajar di Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis adalah ssebagai berikut:

1. Koordinasi

Koordinasi merupakan suatu bentuk kerja sama antara suatu badan, unit maupun instansi untuk menjalankan sebuah kegiatan ataupun tugas tertentu agar satu sama lain saling membantu mengisi dan melengkapi agar tercapainya tujuan yang ingin dicapai.

Dalam pengimplementasian kebijakan pengadan bus sekolah gratis bagi pelajar di

Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis ini koordinasi menjadi faktor penting dalam terlaksananya kebijakan ini. Koordinasi dalam kebijakan ini terjalin tidak hanya diantara dua pihak namun melibatkan banyak pihak. Hal tersebut disampaikan oleh informan dalam wawancara yang peneliti lakukan di lapangan.

2. Lingkungan

Pengaruhnya sudah pasti sangat dirasakan oleh masyarakat terutama oleh para pelajar dan orangtua dimana dari segi ekonomis mereka tidak harus mengeluarkan biaya lebih untuk ongkos berangkat ke sekolah dan dari segi lainnya yaitu ketepatan sampai di sekolah jadi tidak ada lagi yang namanya terlambat masuk sekolah karena macet atau hal lainnya di jalanan.

3. Kurangnya Kesadaran Bertransportasi Aman

Bagaimanapun bagusnya sebuah kebijakan dirancang dan dilaksanakan tetap tidak akan mudah untuk mencapai tujuannya apabila kurangnya kesadaran dari mereka yang terlibat di dalam kebijakan itu sendiri. Begitu pula yang terjadi dalam pelaksanaan kebijakan pengadaan bus sekolah gratis ini dan berikut hasil wawancara peneliti dengan informan penelitian di lapangan:

Dalam implementasi kebijakan pengadaan bus sekolah gratis ini, kurangnya kesadaran para pelajar dan orangtua menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi dimana masih saja ditemui sejumlah pelajar di bawah umur khususnya mereka yang sekolahnya dilalui oleh bus ini setiap harinya yang membawa kendaraan bermotor ke sekolah dan orangtua mereka pun melakukan pembiaran.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Implementasi Kebijakan Pengadaan Bus Sekolah Gratis Bagi Pelajar di Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis sudah terlaksana dengan baik meskipun masih terdapat berbagai kekurangan dalam pelaksanaan kebijakan ini. Namun dengan terlaksananya kebijakan ini sangat membantu tidak hanya pihak sekolah namun juga bagi para pelajar yang lebih mudah untuk menuju sekolah dan juga membantu para orangtua sehingga mereka tidak perlu lagi mengantar anak mereka ke sekolah dan setelah kebijakan ini terlaksana jumlah penggunaan kendaraan bermotor dan angka kecelakaan serta pelanggaran lalu lintas oleh pelajar di bawah umur di Kecamatan Mandau mengalami penurunan.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi Kebijakan Pengadaan Bus Sekolah Gratis Bagi Pelajar di Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis adalah komunikasi, sumber daya, disposisi/sikap pelaksana dan struktur birokrasi. Selain keempat faktor di atas adapula faktor lainnya yang mempengaruhi kebijakan ini yaitu koordinasi, lingkungan dan kurangnya kesadaran untuk bertransportasi aman.

B. Saran

1. Diharapkan perlu dilakukan penambahan armada bus secepatnya agar bisa mengangkut lebih banyak pelajar tidak hanya di rute yang sudah ada namun juga di rute lainnya karena masih banyak pelajar dari sekolah lainnya yang tidak dilalui oleh angkutan umum belum bisa menikmati fasilitas ini sehingga masih banyak pelajar di bawah umur yang membawa kendaraan bermotor ke sekolah.
2. Para pelajar dan orangtua diharapkan meningkatkan kesadaran mereka akan

bahaya penggunaan kendaraan bermotor oleh pelajar di bawah umur sehingga dengan meningkatnya kesadaran mereka bisa mengurangi penggunaan kendaraan bermotor oleh pelajar di bawah umur dan tentu saja bisa mengurangi angka kecelakaan dan pelanggaran lalu lintas oleh pelajar di bawah umur khususnya di Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Said Zainal. 2012. *Kebijakan Publik*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Agustino, Leo. 2008. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- As'ari, Hasim. 2007. *Analisis Efektifitas Implementasi Kebijakan Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Kota Pekanbaru (Kasus di Kecamatan Tenayan Raya)*. Tesis. PPS UNRI: Pekanbaru.
- Dunn, William N. 2003. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah mada University Press.
- Moleong, Lexy J. 2007. *Metode Penelitian Kualitatif*. Rosdakarya : Bandung.
- Nawawi, Ismail. 2009. *Public Policy*. Surabaya: PMN (Putra Media Nusantara).
- Nugroho, Riant. 2014. *Public Policy*. Jakarta: Gramedia.
- Parson, Wayne. 2008. *Public Policy; Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Pasolong, Harbani. 2011. *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Setyadi, Iwan Tritenti. 2005. *Evaluasi Implementasi Proyek Inovasi Manajemen Perkotaan Pemberdayaan Sektor Informal Pedagang kaki Lima Kota Magelang*. Tesis. Yogyakarta: MPKD Universitas Gadjah Mada.

Sugiono. 2003. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: CV Alfabeta.

Sujianto. 2008. *Implementasi Kebijakan Publik*. Pekanbaru: Alaf Riau.

Sumaryadi, I Nyoman. 2005. *Efektivitas Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah*. Jakarta: Citra Utama.

Tangkilisan, Hasel Nogi. 2004. *Kebijakan Publik yang Membumi*. Yogyakarta: YPAPI Lukman Offset.

Wahab, Solichin. 2008. *Implementasi Kebijakan Publik*. Bnadung: AIPI Bandung.

Widodo. 2011. *Analisis Kebijakan Publik (Konsep dan Aplikasi Proses Kebijakan Publik)*. Malang: Bayu Media.

Winarno, Budi. 2016. *Kebijakan Publik Era Globalisasi (Teori, Proses dan Studi Kasus Komparatif)*. Yogyakarta: CAPS (Center of Academic Publishing Service).

SUMBER PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor. 22 Tahun 2009 tentang lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

WEBSITE

<http://dpk.bengkaliskab.go.id/web/statis/visi-misi-dan-indikator-kinerja/1>

<http://dpk.bengkaliskab.go.id/web/statis/sejarah-&-tupoksi/1>

JURNAL

Badan Pusat Statistik Kabupaten Bengkalis. 2016. *Kabupaten Bengkalis dalam Angka 2016*. Bengkalis: BPS Kabupaten Bengkalis.

_____. 2016. *Statistik Daerah Kecamatan Mandau 2016*. Bengkalis: BPS Kabupaten Bengkalis.